

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah yang ada di setiap negara baik itu negara berkembang maupun negara maju pasti dituntut untuk dapat menunjukkan kualitas laporan yang semakin membaik tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan bahwa setiap negara membutuhkan adanya pemerintah yang baik dan mampu mengemban tugas negara. Laporan keuangan pemerintah disajikan dari wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementerian Negara/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah (Bastian, 2010:36)

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Hal mendasar yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah manfaat penerapan sistem informasi manajemen daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keadaan pengelola keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disusun atau dihasilkan dari sebuah sistem informasi manajemen daerah yang handal (Ihsanti, 2014).

Pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan, diperlukan adanya sistem informasi manajemen daerah dan standar akuntansi yang baku yang diterapkan secara konsisten sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban

keuangan tersebut dapat disajikan secara lengkap, tepat waktu dan laporan tersebut berkualitas (Azzindani, dkk 2019).

Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini. Adapun faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Salah satunya adalah Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang bertujuan dalam upaya penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, sehingga kualitas yang dihasilkan dari laporan keuangan daerah tersebut dapat meningkat. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang baik juga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan laporan keuangan dapat disajikan secara lengkap, serta penyusunan laporan keuangan menjadi lebih cepat. Namun kenyataannya tidak semua pegawai di pemerintahan memahami Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) tersebut. SIMDA adalah suatu sistem berbasis aplikasi teknologi yang terintegrasi secara menyeluruh dan mampu menghasilkan informasi yang handal dan relevan sehingga mampu memberi output laporan keuangan yang berkualitas (Azzindani, dkk 2019). SIMDA merupakan aplikasi atau software yang diperuntukkan bagi pemerintahan, yang mampu memberikan kemudahan untuk meningkatkan kinerja dan informasi secara cepat mengenai fungsi penganggaran, fungsi penatausahaan keuangan daerah, hingga fungsi akuntansi dan pelaporan (Ulfiati, 2017).

Faktor lainnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Kinerja aparatur pemerintah pemerintah daerah. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi suatu instansi (Dhiyavani,2017). Kinerja ialah prestasi kerja yang merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya (Azzindani,dkk 2019)

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman didalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar tersebut menjadi syarat yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan (PP No. 71 Tahun 2010). Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Gumelar,(2017)). Maka dengan diterapkan standar pemerintah yang baik, pemerintah daerah akan memiliki kualitas informasi yang baik pula, karena laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kompetensi sumber daya manusia. Menurut Armel (2017) kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi, atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kompetensi harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja agar dapat

menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan.

Agar menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi Pemerintah, keuangan daerah bahkan organisasi tentang pemerintahan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kompetensi pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan penyusunan laporan keuangan. Pengelolaan keuangan daerah pada masing-masing unit satuan kerja perlu di cermati guna menyelesaikan masalah akuntansi dan penyajian informasi yang memadai. Mardiasmo (2002:42) menyatakan terbatasnya jumlah personel pemerintah daerah yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, sehingga mereka tidak peduli atau bahkan tidak mengerti permasalahan sesungguhnya

Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik harus dilakukan dengan mewujudkan tujuan pemerintah yang bersih, dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel. Sistem pertanggungjawaban keuangan suatu instansi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik. Yang berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus memiliki posisi strategis dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah yang baik.

Penyerapan APBD tahun 2019 di Kabupaten Kudus sampai dengan bulan Agustus 2019 baru mencapai 51,74 persen dari total anggaran tahun 2019 yaitu

2,18 triliun. Artinya, yang baru terealisasi sebesar Rp 1,13 triliun. Kepala (BPPKAD) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Eko Djumartono mengatakan, hingga sekarang sudah banyak program dan kegiatan yang terlaksana. Namun pencairannya belum dilakukan sehingga penyerapan belum bisa menjadi tolok ukur bahwa program pembangunan belum berjalan.

Eko Djumartono mengungkapkan bahwa “Laporan keuangan yang ada di BPPKAD berbeda dengan realisasi kegiatan fisik di lapangan yang menjadi tanggung jawab masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD)”. Dari pengalaman setiap tahunnya, pihak ketiga lebih memilih mencairkan anggaran setelah pelaksanaan kegiatan di kerjakan atau jika pembangunan fisik menunggu pembangunannya selesai 100 persen

“ Jika memang program kegiatan yang dalam kerja samanya terdapat pencairan, seharusnya bisa di cairkan setiap pelaksanaan pembangunan,” ucapnya. Kepala BPPKAD menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp 2,18 triliun itu digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten Kudus. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua pos, yakni pos belanja langsung dan tidak langsung. “Untuk pos belanja langsung nilainya sebesar Rp 848,8 miliar, sedangkan pos belanja tidak langsung sebesar Rp 1,33 triliun,” ungkapnya. (MURIANEWS.com)

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian ini termotivasi dari penelitian yang dilakukan oleh Azzindani, dkk (2019) yang mengukur mengenai pengaruh Implementasi

SIMDA, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Penerapan SAP terhadap Kualitas LKPD. Prastiwi, (2018) dalam penelitiannya mengukur mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Kualitas Laporan Keuangan. Ramadhan, (2018) mengukur mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang di lakukan oleh Azzindani,dkk (2019), Abidin (2018), Diana (2018) dan Ulfiati (2017) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) mempunyai pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Kurniawati (2018) menyatakan bahwa Implementasi SIMDA tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Azzindani, dkk (2019) dan Oktarina, dkk.(2016) menyatakan bahwa Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Azzindani dan Irwan (2020) menyatakan bahwa Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian dari Kurniawati (2018), Ulfiati (2017) dan Evicahyani (2016) menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Ramadhan (2018) dan Azzindani, dkk (2019) menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah. Selanjutnya penelitian dari Prastiwi & Mimba (2019), Agung, dkk (2018), Septiana (2017), dan Evicahyani, dkk (2016) menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Ramadhan (2018) menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Azzindani, dkk (2019) dengan judul pengaruh Implementasi SIMDA, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Penerapan SAP terhadap Kualitas LKPD. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Azzindani, dkk (2019) adalah yang pertama penelitian Azzindani, dkk (2019) hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu Implementasi SIMDA, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Penerapan SAP, sedangkan di penelitian ini terdapat penambahan satu variabel independen. Satu variabel ini adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia. Alasan penambahan variabel ini karena Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas tidak hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan

Perbedaan lainnya ialah pada pengambilan sampel penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Azzindani dkk (2019), sampel yang digunakan

adalah OPD di Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan pada penelitian ini mengambil sampel OPD di Kabupaten Kudus

Berdasarkan ringkasan diatas, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Implementasi SIMDA, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan SAP, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas LKPD” (Studi Empiris pada OPD di Kabupaten Kudus)**

1.2 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Implementasi SIMDA, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan SAP dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Obyek penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus.
4. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang diberikan langsung kepada responden di OPD Kudus

1.3 Perumusan Masalah

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat tercipta dengan baik pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus yaitu dapat ditempuh melalui pertimbangan yang matang dan mengarahkan semua kebijakan kualitas laporan keuangan pada pemecahan berbagai masalah yang terkait dengan variabel-variabel yang mempengaruhi dalam meningkatkan kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah seperti Implementasi SIMDA, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan SAP dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
2. Apakah Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
3. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
4. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dilakukannyapenelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empirispengaruh Implementasi SIMDA terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk memperoleh bukti empirispengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk memperoleh bukti empirispengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi bahan informasi ataupun referensi dalam menunjang Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Implementasi SIMDA, kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia sehingga tujuan pemerintahan tercapai

b. Bagi peneliti selanjutnya

Memberikan tambahan bukti empiris mengenai literature akuntansi, khususnya mengenai pengaruh Implementasi SIMDA, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan SAP dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas LKPD

c. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam terkait pengaruh Implementasi SIMDA, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan SAP dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas LKPD. Dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Muria Kudus